

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Diplomasi Indonesia terhadap China dalam investasi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan pada periode 2019–2024 dijalankan melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang pragmatis, selektif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Indonesia memanfaatkan kerja sama dengan China untuk mengatasi keterbatasan modal dan teknologi, sembari tetap menjaga kedaulatan kebijakan energi melalui prinsip *win-win solution*, selektivitas investasi, dan penyesuaian dengan kapasitas struktural domestik. Diplomasi ini tidak diarahkan pada ketergantungan jangka panjang, melainkan pada percepatan transisi energi yang sejalan dengan komitmen iklim global dan stabilitas ekonomi nasional.

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia menghadapi hambatan yang bersifat struktural, finansial, dan teknologis yang saling berkaitan serta berakar kuat pada kondisi ekonomi politik domestik dan dinamika sistem ekonomi global. Hambatan-hambatan tersebut tidak dapat dipahami secara parsial atau teknokratis semata, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari proses diplomasi ekonomi yang kompleks, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori Bayne serta Stephen Woolcock.

Ketergantungan Indonesia yang sangat tinggi terhadap energi fosil mencerminkan kuatnya kepentingan domestik dan struktur ekonomi nasional yang telah lama dibangun di atas fondasi energi fosil, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku industri strategis. Kondisi ini membatasi ruang gerak kebijakan dalam melakukan transisi energi secara cepat dan radikal, sehingga transisi menuju EBT cenderung ditempuh secara bertahap dan selektif. Dalam perspektif diplomasi ekonomi, situasi ini menunjukkan bahwa komitmen global Indonesia terhadap transisi energi harus terus dinegosiasikan dengan realitas domestik yang masih sangat bergantung pada energi fosil.

Hambatan finansial dan investasi semakin mempertegas keterbatasan kapasitas fiskal dan *relative economic power* Indonesia dalam mendanai transisi energi secara mandiri. Tingginya kebutuhan *capital expenditure*, rendahnya daya saing harga EBT dibandingkan energi fosil, keterbatasan insentif kebijakan, serta

preferensi lembaga keuangan terhadap proyek berisiko rendah menjadikan investasi EBT kurang menarik tanpa dukungan kebijakan yang kuat. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui penarikan investasi asing, pembiayaan iklim, dan kerja sama dengan lembaga keuangan internasional.

Di sisi lain, tantangan teknologis menunjukkan bahwa pengembangan EBT di Indonesia sangat bergantung pada teknologi impor, khususnya untuk sistem penyimpanan energi, baterai, dan teknologi pembangkit canggih. Ketergantungan ini mencerminkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global sebagai negara penerima teknologi, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan struktural jangka panjang. Dalam kerangka Stephen Woolcock, kondisi tersebut menegaskan bahwa diplomasi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan akses investasi, tetapi juga dengan negosiasi transfer teknologi, penguatan kapasitas domestik, dan pengelolaan asimetri kekuatan ekonomi antarnegara.

Pembahasan mengenai peran kebijakan nasional menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menempatkan transisi energi sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional dan keamanan negara. Partisipasi aktif dalam rezim internasional perubahan iklim, seperti Paris Agreement dan NDC, menunjukkan komitmen normatif Indonesia di tingkat global. Namun, implementasi komitmen tersebut tetap disesuaikan dengan kapasitas struktural domestik, mencerminkan pendekatan diplomasi ekonomi yang pragmatis dan kontekstual. Kebijakan seperti RUPTL dan penyesuaian TKDN memperlihatkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dijalankan sebagai proses negosiasi berkelanjutan antara kepentingan nasional, tuntutan global, dan dinamika pasar.

Dalam konteks kerja sama Indonesia–China, prinsip *win-win solution* muncul sebagai strategi diplomasi ekonomi untuk mengelola asimetri kekuatan dan memaksimalkan manfaat jangka panjang. Kerja sama tidak hanya diarahkan pada penarikan modal dan pembangunan proyek energi terbarukan, tetapi juga mencakup transfer teknologi dan *transfer knowledge* melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran keahlian teknis, serta kolaborasi penelitian dan kebijakan di sektor energi bersih. Pendekatan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memanfaatkan diplomasi ekonomi sebagai instrumen transformasi struktural, di mana

kerja sama internasional tidak semata-mata berfungsi sebagai solusi pembiayaan jangka pendek, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat industri domestik dan kapasitas nasional dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, prospek pengembangan EBT di Indonesia tetap terbuka dan cukup positif, namun sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola hambatan struktural domestik melalui reformasi kebijakan, penguatan kapasitas institusional, serta pemanfaatan diplomasi ekonomi secara strategis. Kerangka Bayne serta Stephen Woolcock menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh intensitas kerja sama internasional, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menyeimbangkan kepentingan domestik, komitmen global, dan dinamika pasar internasional. Dengan demikian, diplomasi ekonomi menjadi instrumen kunci dalam memastikan bahwa transisi energi Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan, realistis, dan selaras dengan kepentingan nasional jangka panjang.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademik

Kajian mengenai diplomasi Indonesia terhadap China dalam investasi pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) masih membuka ruang pengembangan yang luas secara akademik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam analisis dengan menggunakan pendekatan komparatif antarnegara mitra, misalnya dengan membandingkan diplomasi energi Indonesia terhadap China dengan Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara Eropa. Pendekatan komparatif tersebut akan memperkaya pemahaman mengenai variasi strategi diplomasi ekonomi Indonesia serta perbedaan mekanisme transfer teknologi, skema pembiayaan, dan implikasi kebijakan nasional yang dihasilkan dari masing-masing kerja sama bilateral.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan kerangka analisis diplomasi ekonomi Bayne & Woolcock dan Stephen Woolcock dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi politik internasional atau *global value chains*. Pendekatan ini penting untuk mengkaji posisi Indonesia dalam rantai nilai global energi terbarukan, khususnya dalam industri baterai, panel surya, dan teknologi penyimpanan energi. Dengan demikian, diplomasi energi tidak hanya dianalisis

sebagai hubungan antarnegara, tetapi juga sebagai interaksi antara negara, perusahaan multinasional, dan struktur pasar global yang memengaruhi kemandirian teknologi nasional.

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti *mixed methods* atau studi kebijakan berbasis data kuantitatif, guna mengukur secara lebih konkret dampak diplomasi energi terhadap peningkatan kapasitas nasional, tingkat alih teknologi, serta kontribusi investasi EBT terhadap penurunan emisi dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini akan memperkuat kontribusi akademik penelitian energi dan diplomasi ekonomi, sekaligus memberikan basis empiris yang lebih solid bagi perumusan kebijakan publik.

6.2.2 Saran Praktis

Secara praktis, pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat koordinasi kebijakan domestik sebagai prasyarat utama keberhasilan diplomasi energi. Penyederhanaan perizinan, harmonisasi kebijakan pusat–daerah, serta reformasi tata kelola lahan menjadi langkah krusial agar hasil diplomasi investasi EBT dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat proyek. Tanpa penguatan kapasitas institusional domestik, diplomasi energi berisiko berhenti pada tataran komitmen dan kesepakatan, tanpa memberikan dampak nyata bagi percepatan transisi energi.

Pemerintah juga perlu merancang skema insentif fiskal dan nonfiskal yang lebih konsisten dan kredibel untuk meningkatkan daya tarik investasi EBT, terutama dalam menghadapi dominasi energi fosil yang masih lebih kompetitif secara harga. Kebijakan seperti jaminan harga listrik, kontrak pembelian jangka panjang, serta dukungan pembiayaan hijau perlu diintegrasikan secara strategis dengan agenda diplomasi ekonomi, sehingga Indonesia tidak hanya menarik investor, tetapi juga mampu mengarahkan investasi tersebut sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional.

Dalam konteks kerja sama dengan China, prinsip *win-win solution* perlu diterjemahkan secara lebih operasional melalui mekanisme transfer teknologi yang terukur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan industri domestik. Pemerintah disarankan untuk memastikan bahwa setiap proyek investasi EBT tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga

berkontribusi pada pembentukan ekosistem industri energi terbarukan nasional, termasuk riset, manufaktur, dan inovasi teknologi. Pendekatan ini penting untuk meminimalkan risiko ketergantungan teknologi jangka panjang dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global EBT.

Selain itu, Indonesia perlu terus menjaga diversifikasi mitra kerja sama internasional dalam pengembangan EBT guna menghindari ketergantungan strategis pada satu negara. Diplomasi energi yang bersifat inklusif dan non-eksklusif akan memperkuat posisi tawar Indonesia, sekaligus memberikan ruang bagi transfer teknologi yang lebih beragam dan kompetitif. Dengan memanfaatkan diplomasi ekonomi secara strategis dan didukung oleh reformasi domestik yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat transisi energi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan stabilitas ekonomi jangka panjang.